

Menyikapi KTSP sebagai Tantangan untuk Menyelenggarakan Pembelajaran yang Lebih Baik

Suhadi Ibnu

Abstract: *The introduction of Curriculum on Educational Items Level (CEIL) by Depdiknas was variously responded. Half of the responses were not proper and can hold back or decrease the implementation of this CEIL. A number of teachers and educational staff even consider it as a product of the new educational otoriter “bragger” by publishing previous educational products with a new cover. Other teachers and educational staffs view this CEIL as a new curriculum, so everything must be changed. To face and response correctly, in this writing, there would be critical analysis on CEIL as the aspirational implementation of the nation thought, and as a challenge for the students and school. The culmination of thought to get maximum benefit from CEIL implementation is the harmonious synergy between students, teachers, and school to optimize everyone’s role..*

Key Words: *KTSP, curriculum implementation, school based curriculum*

Banyak pihak menyikapi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara kurang tepat. Di antara yang menyikapi secara kurang tepat ini, yang paling banyak dijumpai adalah mereka yang menganggap bahwa KTSP adalah kurikulum baru yang berbeda sama sekali dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004/2006. Sebagai konsekuensinya segala sesuatu yang terkait dengan implementasi kurikulum yang berlaku sebelumnya harus pula dibenahi atau dirombak sama sekali. Anggapan ini, walaupun mungkin timbul sebagai akibat sikap apriori sejumlah orang saja—suatu stigma yang menggeneralisasikan pergantian kurikulum semata-mata sebagai ‘kegenitan’ otorita pendidikan baru—akan sangat mungkin menimbulkan dampak yang kurang baik dalam bentuk komitmen yang rendah dari pelaksana kegiatan pendidikan terhadap implementasi kurikulum yang diberlakukan. Secara tidak sadar mereka yang mengalami stigma ini akan melakukan penolakan psikologis.

Untuk menghindari dampak negatif yang kemungkinan terjadi seperti diuraikan di atas, perlu disosialisasikan secara luas dan benar esensi KTSP dan potensi dampak positif yang akan dihasilkan di dalam praktik pendidikan di lapangan. Sikap

kritis terhadap ide pembaharuan pendidikan memang perlu dikembangkan, tetapi harus disertai dengan sikap keterbukaan (*open-mindedness*) dan keobjektifan di dalam menilai ide pembaruan tersebut. Agar kesetimbangan penyikapan ini dapat terjadi diperlukan pemajanan yang cukup komprehensif, dengan mengedepankan sisi-sisi positif secara berimbang dengan potensi *hazards* yang dapat ditimbulkannya—terutama bila ide pembaharuan tersebut tidak dipahami secara benar. Di dalam tulisan ini dicoba dipaparkan secara kritis analitik, esensi KTSP dan pola penyikapan yang lebih objektif dan proporsional dalam paradigma pembelajaran yang banyak dianut sejak akhir millenium yang lalu.

KTSP SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN ASPIRASI PENDIDIKAN BANGSA

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini, walaupun dirumuskan secara sangat ringkas, mengandung makna yang dalam dan membawa konsekuensi yang sangat luas dan kompleks di dalam perjalanan kehidupan bang-

sa. Kehidupan bangsa yang cerdas merupakan titik awal dari pembangunan masyarakat bangsa yang demokrasi, bersatu, adil dan makmur. Dengan penalaran yang sederhana tidak sulit dipahami bahwa hanya dengan kecerdasan yang memadai kehidupan demokrasi suatu bangsa dapat dibangun, dan dengan demokrasi itulah kemakmuran dan keadilan dapat diperjuangkan. Dalam kaitan dengan hal ini, Mangunwijaya (1999) menyatakan bahwa: "*Demokrasi hanya dapat datang dari bangsa yang berkebiasaan berfikir rasional, yang emosi-emosinya yang wajar lazimnya dikendalikan oleh otak. Suatu nation demokratis adalah nation dari bangsa yang cerdas.*" Dengan formulasi berbeda, Urbaningrum (2004) menyatakan bahwa hanya dengan kecerdasanlah sendi-sendi kehidupan demokratis suatu bangsa dapat ditegakkan. Dengan kecerdasannya suatu bangsa dapat mengembangkan kultur dan disiplin yang tinggi serta kesadaran saling menghargai dan tahu akan hak dan kewajiban masing-masing. Tanpa kecerdasan kolektif yang memadai cita-cita akan kehidupan demokrasi suatu bangsa hanyalah utopia belaka.

Mempelajari dan mempraktikkan demokrasi dengan baik adalah suatu keharusan, keduanya adalah suatu kesatuan tak terpisahkan, karena hanya dengan belajar berdemokrasi dengan baik seseorang akan dapat mempraktikkannya dengan baik pula dalam kehidupan yang sebenarnya. Implementasi KTSP dapat dipandang sebagai realisasi pembelajaran demokrasi di dalam komunitas dan lingkungan sekolah karena dengan KTSP komunitas sekolah mendapat kesempatan luas untuk mengaktualisasikan cita-cita bersama melalui pengembangan visi, isi, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya Mangunwijaya (1999: 179-190) menyatakan:

"Demikianlah demokrasi mutlak mengandalkan sistem pendidikan yang memberikan prioritas pembelajaran para siswa untuk mencintai eksplorasi, kreativitas, daya pikir yang kritis; yang membina keyakinan-keyakinan pribadi yang mampu berelasi dengan *fair play* yang mendasar yang memberi kesempatan untuk berekspresi bebas. Dengan kata lain yang diperlukan adalah sistem pendidikan untuk berpikir cerdas, melihat dunia tidak naif, dalam suatu kerangka pandangan yang tidak hitam-putih fasis, dengan suatu penyelesaian yang sudah dipracetak untuk setiap soal. Demokrasi berarti emansipasi, yang harus dimulai sejak masa kanak-kanak. Dengan demikian bakat-bakat pribadi dimekarkan, dihargai kepribadian-kepribadian kemanusiaan yang beragam warna."

Pernyataan para tokoh nasional di atas menyiratkan pesan bahwa kurikulum sebagai representasi substansi cita-cita pendidikan anak bangsa haruslah mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang diinginkan untuk dicapai. Selain sebagai representasi substansi atau isi pendidikan, kurikulum juga diharapkan menampilkan cerminan epistemologis-metodologis bagaimana seharusnya penguasaan substansi pembelajaran dapat dicapai. Pandangan Mangunwijaya (1999) yang dipaparkan di atas secara tegas menghendaki agar sistem pendidikan memberikan kesempatan cukup kepada para siswa untuk mengembangkan kecintaan kepada eksplorasi, kreativitas, daya pikir kritis, *fair play* dan kemampuan berekspresi bebas. Emansipasi dalam arti pemberian hak anak untuk menyatakan pendapat, harus dikembangkan sebagai budaya komunikasi yang adil di dalam pendidikan. KTSP memberi tempat yang luas untuk pengembangan budaya demokrasi ini, sejalan dengan pandangan Buchori (2000), yang memandang sangat penting pengaruh mutu pendidikan dasar yang diterima seseorang terhadap perilaku demokratis yang akan ditampilkannya.

Didalam konteks kehidupan berbangsa, dua komponen kurikulum yang ditawarkan KTSP adalah representasi substansi dan metodologi untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Struktur formal KTSP yang disajikan dalam bentuk silabus mengandung aspek-aspek ini, yaitu materi ajar atau pengalaman belajar, dan strategi pembelajaran (Wibowo, 2006). Terkait dengan materi ajar atau pengalaman belajar, kepada sekolah diberikan ruang yang luas untuk mengisi dan mengembangkannya. Tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan kepentingan nasional saja, tetapi juga yang terkait dengan nilai-nilai budaya, potensi, dan kepentingan daerah. Perhatian terhadap hal ini di dalam pedoman penyusunan KTSP diturunkan sampai pada tingkatan otorita yang paling bawah—yaitu sekolah—dengan asumsi dasar bahwa sekolah adalah institusi terdepan yang paling memahami kepentingan masyarakat dan daerah di mana sekolah tersebut berada. Dengan diimplementasikannya KTSP di sekolah-sekolah, aspirasi pendidikan bangsa dari yang paling inklusif pada tataran nasional sampai yang paling spesifik pada tataran lokal dan institusional serta kepentingan perkembangan anak, dapat diakomodasikan.

Sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah akan sangat berperan dalam pengembangan dan implementasi KTSP, termasuk pengembangan perangkat pembelajaran yang lebih rendah tingkatannya seperti silabus dan rencana program pembelajaran (RPP). Beberapa pedoman pengembangan yang dibutuhkan sudah tersedia, seperti yang dipaparkan di dalam tiga ayat di bawah ini.

Ayat (1), Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ayat (2), Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

Ayat (3), Kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) peningkatan iman dan taqwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (h) agama, (i) dinamika perkembangan global, dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Dari butir-butir pedoman penyusunan KTSP di atas dapat dinyatakan bahwa KTSP berusaha untuk mengakomodasikan secara proporsional kepentingan nasional, daerah, sekolah, dan peserta didik. Ini berbeda sekali dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang biasanya 'diturunkan' secara utuh dari Depdiknas di Jakarta untuk diikuti dan diimplementasikan secara utuh tanpa perubahan. Sudah barang tentu, dengan kapasitasnya untuk mengakomodasikan kepentingan daerah dan peserta didik, KTSP adalah kurikulum yang lebih baik. Di dalam era desentralisasi dan otonomi sekarang ini, aspirasi pendidikan bangsa haruslah menyediakan tempat bagi kepentingan daerah, dan kepentingan peserta didik.

Di dalam KTSP urusan menjamin pelayanan terhadap kepentingan peserta didik ini diberikan wadah di dalam standar kompetensi lulusan, dan KTSP itu sendiri adalah kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, termasuk isi dan kompetensi lulusan (Wibowo, 2006).

KTSP SEBAGAI TANTANGAN BAGI SEKOLAH

Apakah ada perbedaan antara sekolah yang mengimplementasikan KTSP dan yang tidak? Tentu saja ada. Dengan mengadopsi dan mengimplementasikan KTSP, secara implisit sekolah menyatakan dengan sadar bahwa sekolah yang bersangkutan *commit* terhadap berbagai pembaharuan dan perubahan terhadap tatanan, aturan dan kebiasaan yang selama ini diikuti. Hal terpenting di antara perubahan yang harus diikuti sekolah adalah menerima Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan sekolah, terutama untuk standar-standar yang dapat diupayakan sendiri pencapaiannya oleh sekolah. Hal ini membawa konsekuensi yang tidak ringan, karena sekolah harus melakukan perubahan-perubahan besar.

Standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar isi, standar penilaian pendidikan dan standar pengelolaan adalah standar-standar yang pencapaiannya dapat dan seharusnya diupayakan sendiri oleh sekolah. Untuk pencapaian standar-standar ini sekolah harus mengerahkan segala potensinya agar paling tidak dapat memenuhi standar minimal yang ditetapkan, yaitu standar nasional. Sekolah-sekolah dengan potensi di atas standar nasional dapat menetapkan standar yang lebih tinggi. Acuan standar minimal yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Kompetensi mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran tertentu.

Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagai acuan dalam pengembangan KTSP.

Standar Proses Pendidikan

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah adalah (1) menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dan (2) menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.

Nuansa terpenting dari standar-standar yang diuraikan di atas adalah pengembangan kecerdasan, kepercayaan diri sendiri, kemandirian, kemampuan berkembang, aktivitas, dan kreativitas serta jiwa demokratik pada diri peserta didik. Ini semua akan dapat dicapai jika diupayakan melalui inovasi-inovasi di dalam proses pendidikan serta pengakuan atas keberhasilan peserta didik, di dalam lembaga pendidikan yang dikelola dengan azas kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Inilah tantangan baru bagi sekolah, yang memerlukan respons dan penyikapan yang a-

mat berbeda jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di masa yang lalu. Karena KTSP dikembangkan berdasar standar-standar tersebut, setiap sekolah yang mengadopsi KTSP harus mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan yang menyertainya.

KTSP SEBAGAI TANTANGAN BAGI PESERTA DIDIK

Suasana belajar dengan KTSP berbeda jauh dibandingkan suasana belajar dengan kurikulum terdahulu. Standar kompetensi lulusan yang merupakan acuan kualifikasi minimal yang diharapkan bisa dicapai lulusan adalah tantangan yang harus dijawab oleh siswa. Secara formal standar kompetensi lulusan merupakan acuan untuk meletakkan dasar dan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Penulis lain mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.

Kepemilikan kemampuan atau kompetensi di atas adalah hasil dari kegiatan belajar. Tanpa usaha yang memadai, dalam bentuk kemauan dan usaha, sukar diharapkan bahwa siswa akan memperoleh kemampuan-kemampuan tersebut. Inilah tantangan yang harus dihadapi peserta didik. Untuk menjawab tantangan ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi bila diingat bahwa standar kompetensi lulusan (SKL) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.

Pandangan belajar modern adalah pandangan konstruktivistik, siswa ditantang untuk membangun sendiri pemahaman atas fakta, konsep, hukum dan teori, serta berbagai bentuk hubungan di antara unsur-unsur ilmu pengetahuan ini. Menurut salah satu model belajar yang termasuk di dalam kategori konstruktivistik, yaitu model belajar generatif (Osborne dan Wittrock, 1985), model belajar bermakna yang dikembangkan oleh Ausubel (1978), proses belajar di mulai pada saat siswa menerima dan menyeleksi rangsangan yang masuk ke dalam struktur kognitifnya, baik yang berupa data hasil pengamatan langsung maupun informasi tingkat kedua yang sudah tersaji dalam struktur tertentu.

Proses selanjutnya yang terjadi di dalam kegiatan belajar adalah pembentukan makna (*meaning construction*) yang hanya akan terjadi bila dapat dibuat kaitan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya makna atau pemahaman yang sudah terbentuk akan diuji atau divalidasi dengan menggunakan memori jangka pendek dan jangka panjang yang juga sudah terdapat di dalam struktur kognitif siswa, untuk diasumsikan atau diintegrasikan ke dalam struktur kognitif tersebut. Dengan demikian struktur kognitif siswa menjadi lebih kaya, kompleks dan lengkap. Struktur kognitif yang lebih kaya, kompleks dan lengkap ini memungkinkan siswa untuk menjalani tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang lebih tinggi derajatnya. Sebaliknya, jika *summation* dan integrasi ini tidak dapat terjadi karena tidak *compatible* dengan struktur kognitif yang sudah ada, semua rangsangan dan hasil proses belajar 'sementara' yang sudah diperoleh itu akan ditolak kembali.

Sekolah dan guru berkewajiban memfasilitasi kegiatan belajar siswa agar efektif dan berhasil guna. Agar proses belajar konstruktivistik dapat terjadi, di samping dukungan faktor-faktor lain, guru harus dapat menjalankan perannya secara tepat. Dalam pandangan belajar konstruktivistik guru bukan lagi sebagai sumber pengetahuan utama, tetapi lebih sebagai fasilitator yang bertugas membantu agar kegiatan belajar siswa dapat berlangsung secara optimal. Dalam istilah Joyce dan Weil (1980), guru bertugas memfasilitasi agar pemrosesan informasi oleh siswa dapat terjadi dan berlangsung dengan baik. Selain itu, lingkungan belajar yang ada harus benar-benar kondusif dalam mendukung terjadinya proses dari sejak penajaman rangsangan yang merupakan pemicu awal proses belajar sampai tahap validasi atau pengujian apakah pemahaman yang dikembangkan siswa benar dapat diterapkan di dalam konteks yang relevan. Kelas yang merupakan unit inti lingkungan belajar harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat benar-benar berfungsi sebagai lingkungan belajar yang mendukung dan memperlancar proses belajar.

Salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan keefektifan belajar siswa adalah pengetahuan akan arah dan tujuan pembelajaran (Renner, 1982). Dengan bahasa KBK, pengetahuan akan kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai sebagai hasil proses belajar akan memberikan ancangan

yang lebih baik untuk memulai kegiatan belajar. Pengetahuan akan standar kompetensi yang harus dicapai akan menggugah kesadaran siswa bahwa dia harus bekerja keras dan dengan aktif berusaha mencapai kompetensi tersebut. Apalagi jika diingat bahwa kompetensi yang dicanangkan di dalam Standar Nasional Pendidikan mencakup ketiga ranah hasil belajar yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Rumusan kompetensi lulusan yang tepat, sederhana dan jelas akan membantu siswa untuk mempersiapkan diri dan memaksimalkan kinerjanya dalam usahanya untuk mencapai kompetensi tersebut. Oleh karena itu di dalam iklim KBK dan KTSP perumusan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) sampai indikatornya dituntut untuk dirumuskan secara jelas dan selanjutnya dikomunikasikan kepada siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Rosyada (2004: 12) bahwa, "Arah reformasi pendidikan pada abad 21 ini adalah demokratisasi dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan, didukung oleh komunitasnya sebagai kontributor penyelenggaraan pendidikan tersebut."

SINERGI SISWA, GURU, DAN SEKOLAH MENINGKATKAN KEEFEKTIFAN KTSP

Untuk memaksimalkan KTSP dan mengoptimalkan kemanfaatannya bagi peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa, harus dikembangkan sinergi yang harmonis antara siswa, guru dan sekolah. Siswa sebagai figur utama kegiatan belajar adalah pihak pertama yang harus mampu menjalankan perannya dengan benar: aktif, kreatif, dan efektif. Untuk itu siswa perlu memahami benar—atau diberikan pemahaman yang benar—tentang hakikat belajar. Hakikat belajar dalam paradigma konstruktivisme berintikan kegiatan mencari, menemukan, menganalisis dan mengembangkan makna atau pemahaman atas fenomena yang teramati, dan sama sekali bukan kegiatan mengumpulkan informasi semata untuk kemudian diartikulasikan kembali. Oleh karena itu, kegiatan belajar tidak akan terjadi jika siswa hanya menunggu sajian-sajian informasi matang yang hanya siap untuk dijadikan koleksi.

Agar siswa dapat menjalankan tugas belajarnya dengan baik, hak-hak siswa untuk mendapatkan kemudahan harus diberikan. Di dalam hal ini

gurulah pihak pertama yang mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut. Siswa berhak tahu kompetensi yang harus dikuasainya sebagai hasil belajar. Siswa juga berhak untuk memperoleh bantuan agar lebih mudah mencapai kompetensi-kompetensi tersebut, dan untuk mengetahui sejauh mana usahanya untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut telah tercapai.

Sebagai tanda bahwa guru telah menjalankan kewajibannya membantu siswa dalam usahanya mencapai kompetensi yang diharapkan, dalam konteks KTSP, guru diharapkan melaksanakan tugas-tugas berikut: (1) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan, yaitu silabus, RPP, dan dokumen-dokumen lain yang relevan seperti program tahunan (prota) dan program semester (promes). (2) Mengidentifikasi materi dan pengalaman belajar yang diperlukan. (3) Merancang *setting* pembelajaran yang efektif. (4) Menyiapkan alat bantu belajar yang diperlukan (5) Membimbing dan membantu siswa dalam belajar. (6) Melakukan evaluasi keberhasilan belajar siswa dengan cara yang tepat. (7) Melaporkan keberhasilan belajar siswa kepada pihak-pihak yang terkait dan memberikan saran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada.

Usaha siswa dan guru sebagaimana diuraikan di atas hanya akan dapat terjadi apabila sekolah mendukung secara positif. Untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi kegiatan belajar siswa, sekolah diharapkan secara sistemik merancang, mengembangkan dan memeliharanya. Selain lingkungan fisik yang terdiri dari lahan, bangunan dan perlengkapannya, pengembangan kultur sekolah dan iklim akademik yang baik adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi implementasi KTSP secara efektif dan berkualitas.

PENUTUP

KTSP bukanlah perubahan kurikulum yang sudah ada, melainkan representasi dari kurikulum yang berlaku selama ini, yaitu kurikulum tahun 2004/2006, di dalam konteks aktual masing-masing sekolah atau sistem persekolahan.

Diperlukan penyikapan yang tepat dan proporsional dari semua pihak agar KTSP tidak memicu penolakan pada tataran psikologis atau praksis organisasi sekolah. Implementasi KTSP akan me-

nimbulkan konsekuensi yang berupa perubahan sikap, kultur dan kebiasaan yang selama ini diikuti oleh semua pihak di dalam lingkungan sekolah, karena KTSP memang menggunakan paradigma baru yang berbeda dengan paradigma formatif dan operasional organisasi yang diikuti sebelumnya.

Diperlukan sinergi yang harmonis semua pihak dalam lingkungan sekolah yaitu siswa, guru dan pengelola sekolah agar KTSP dapat diimplementasikan secara benar, efektif dan berhasil guna meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Diperlukan waktu yang cukup panjang untuk melihat implementasi KTSP berjalan sebagaimana diharapkan dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan akademik dan sosial sekolah. Oleh karena itu, kesabaran dan kejelian melihat kekurangan-kekurangan yang ada serta kreativitas untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut sangat diperlukan untuk diupayakan dengan sungguh-sungguh dan tidak terlalu cepat ditinggalkan apabila suatu usaha belum menunjukkan hasil yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausubel, D.P., Novak, J.D. & Hanessian, H. 1978. *School Learning: An Introduction to Educational Psychology*. New York: Graeme & Stranton
- Buchori, M. 2000. *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia. dalam Sindhunata Ed. Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Kanisius
- Joyce, B. & Weil, M. 1980. *Models of Teaching*. New York: Prentice/Hall
- Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Menuju Republik Indonesia Serikat*. Jakarta: Gramedia
- Osborne, R. & Wittrock, M. 1985. The Generative Learning Model and Its Implication for Science Education. *Studies in Science Education*
- Renner, J.W. 1982. The Power of Purpose. *Science Education* 66, 5, 709-16
- Rosyada, D. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Prenada Media
- Urbaningrum, A. 2004. *Islamo-Demokrasi. Pemikiran Nurcholis Madjid*. Jakarta: Republika
- Wibowo, M.E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta: Ditjen Dikti.